

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan kemajuan dan membuka tabir masa depan bangsa dan memberi harapan kehidupan yang lebih sejahtera. Dunia sedang menuju ke arah terbentuknya tatanan baru yang belum jelas bentuk akhirnya. Globalisasi telah muncul sebagai gejala yang dilahirkan oleh perkembangan. Dalam proses globalisasi dilahirkan pula berbagai kecenderungan yang akan mewarnai kehidupan dimasa depan (Sedarmayanti, 2014:138).

Setiap negara pada umumnya mencantumkan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara menurut Soemantri merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Karena itu rakyat-bangsa yang menempati sebuah negara telah mencantumkannya dalam konstitusi negara. Biasanya antara ketentuan pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah, tingkat kemakmuran, tingkat pelayanan publik, sistem politik, ekonomi, hukum, dan tingkat pendidikan, disiplin budaya bangsa, serta konstelasi dan banyaknya masalah bangsa itu (dalam Taniredja dkk, 2011:167/170).

Di era reformasi yang hingga kini tengah berlangsung di Negara Republik Indonesia yang kita cintai setelah kekuasaan Pemerintah orde baru yang serba

terpusat berakhir, telah memberikan harapan dan peluang bagi upaya perubahan dan perbaikan disegala bidang kegiatan dari pemerintahan dan pembangunan, seperti pada bidang ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu perubahan yang menonjol dan hingga kini terus diupayakan adalah yang berkenaan dengan cara pandang mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan persoalan-persoalan kebijakan, sosial, budaya dan ekonomi, kesehatan, pendidikan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh pemerintah pusat maupun daerah (Lembaga Administrasi Negara, 2009 : 1).

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *auto* berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan, dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rosidin, 2010:85).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang dan mengembangkan daya saing memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban *public* (masyarakat daerah) serta pertanggung

jawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan sebagian urusan (otonomi daerah) ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2011:76).

Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial, masalah yang dihadapi adalah kemampuan Sumber Daya Manusia apakah cukup mampu mengelola sumber daya alamnya (Widjaja, 2011:79).

Pemberdayaan masyarakat atau sumber daya manusia lebih bertitik tolak pada bagaimana peningkatan pengetahuan dan perluasan wawasan dalam hal ini dibidang pendidikan sesuai dengan profesi masing-masing. Pemberdayaan yang dilakukan diharapkan agar daerah semakin mampu dan mandiri, serta dapat memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bagaimana dapat menunjukkan ciri sebagai masyarakat yang turut membangun daerah.

Dalam membangun daerah, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab mengembangkan sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan serta meningkatkan sumber daya manusia, demi kemajuan suatu daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo memiliki program unggulan yang diantaranya yaitu peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, yang sejalan dengan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Boalemo, adapun Visi Kabupaten Boalemo adalah mewujudkan Boalemo sebagai kabupaten produktif dan mandiri. Misi kabupaten Boalemo adalah membangun masyarakat Boalemo yang cerdas, membangun masyarakat Boalemo yang berkualitas, serta membangun masyarakat Boalemo yang sejahtera. Dari program unggulan dan visi-misi tersebut jelas bahwa pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini dengan memberikan jaminan pendidikan atau beasiswa kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Boalemo yang akan melanjutkan studi dan yang sementara melaksanakan studi. Melalui pelaksanaan kebijakan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2012, dan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, serta Keputusan Bupati Boalemo Nomor 31 tahun 2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Dalam surat keputusan tersebut bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan, khususnya beasiswa bagi mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Tentunya ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan daerah.

Maka dari itu kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia tentunya dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kegiatan sumber daya manusia khususnya pada pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Boalemo, akan tetapi dalam implementasinya kebijakan tersebut belum maksimal karena kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak memiliki akses untuk memperoleh beasiswa. Terkadang yang sering mendapatkan informasi dan memiliki akses hanya orang-orang tertentu yang dekat atau yang mempunyai koneksi dalam pemerintahan tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan studi tersebut, sehingga dalam kebijakannya pemerintah masih belum maksimal dan efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang didapatkan, ternyata kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam hal pemberian bantuan beasiswa belum merata sehingga membuat segelintir dari mahasiswa yang berekonomi dibawah kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam***

Pengembangan Sumber Daya Manusia” (Studi Kasus pada pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Boalemo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam pengembangan sumber daya manusia?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memajukan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi saya sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Bagi Akademik : dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti : dapat memperoleh informasi tambahan dan pemahaman yang lebih baik tentang Kebijakan pemerintah Daerah dan sebagai pengalaman berharga bagi peneliti.
3. Bagi Pembaca : dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan yang dimiliki.